

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

#### **1. Sejarah berdirinya Provinsi Banten**

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 8.651,20 Km<sup>2</sup>. Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11"2; - 106°7'12"2; BT dan 5°7'50"2; - 7°1'1"2; LS, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2006 sebesar 9.308.944 Jiwa.

Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

## 2. Arti Logo Banten



(gambar 3.1 logo Banten)

1. Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamis.
2. Bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Menara Mesjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT.
4. Gapura Kaibon, melambangkan Daerah Propinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi.
5. Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwarna coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia.
6. Gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan.

7. Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.
8. Laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya.
9. Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri.
10. Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta.
11. Lampu bulatan kuning, melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita.
12. Pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten.
13. Semboyan “IMAN TAQWA” sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera.

### **3. Arti warna yang digunakan dalam simbol daerah.**

1. Merah: melambangkan keberanian
2. Putih: melambangkan suci, arif dan bijaksana
3. Kuning: melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran
4. Hitam: melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati
5. Abu-abu: melambangkan ketabahan
6. Biru: melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan
7. Hijau: melambangkan kesuburan
8. Coklat: melambangkan kemakmuran

#### 4. VISI Dan MISI Provinsi Banten

**V i s i** Provinsi Banten 2012 - 2017 :

*“ Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera  
Berlandaskan Iman dan Taqwa ”*

#### **M i s i**

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang berwawasan lingkungan;
2. Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI;
4. Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang, dan;
5. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

#### 5. Sejarah Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

##### 1. Tugas

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “ Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan ”, dan pada ayat (2) menyebutkan “ Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada Pasal 32 menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah
- b. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas.
- c. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- f. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang sumber daya mutu kesehatan
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pembinaan kesehatan masyarakat.
- h. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan
- i. Pembinaan jabatan fungsional
- j. Pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

## **6. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Banten.**

### 1. VISI

## ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTEN SEHAT YANG MANDIRI BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

“Terwujudnya Masyarakat Banten ” ;

Merupakan wujud betapa besarnya komitmen terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan atau strata sosial.

“Sehat Yang Mandiri” ;

Merupakan cerminan dari suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi untuk menolong dirinya sendiri, keluarga dan orang lain

“Berlandaskan Iman dan Taqwa” ;

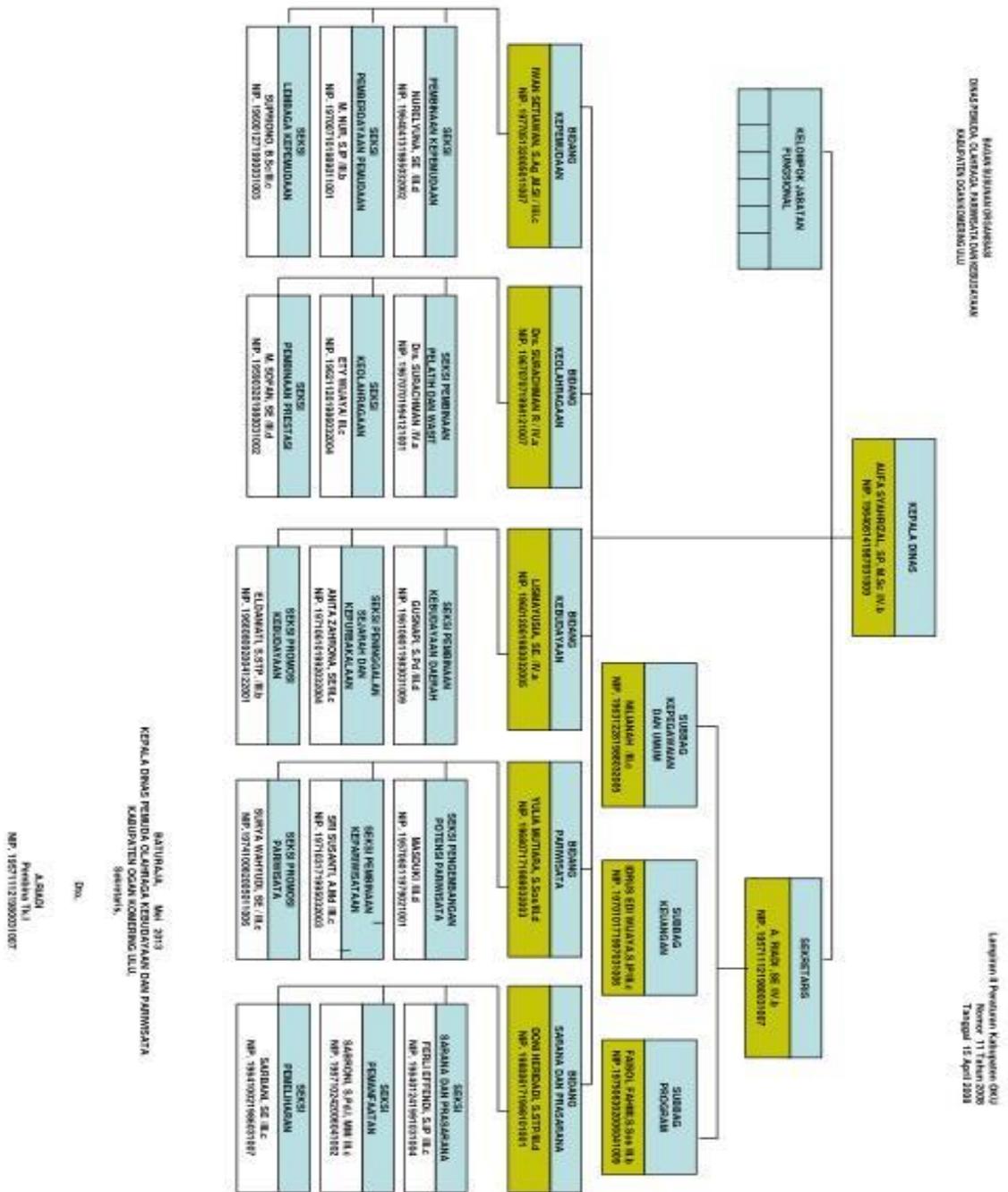
Merupakan do’a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

### 2. MISI

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
- b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan;
- c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

# Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten.



Gambar 3.2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Sumber: Dinas Kesehatan Banten, 2013

Berdasarkan gambar struktur organisasi tersebut, dapat dijelaskan tugas dari masing-masing yang terlibat dalam penyuluhan kesehatan, yakni:

### **1. Tugas Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat**

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yaitu Bapak Akhrul Aprianto yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kepala bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas menyusun dan fasilitasi petunjuk teknis kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian unit kesehatan sekolah, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta penyebarluasan informasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang bina kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun, kesehatan usia lanjut, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS).
2. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan, upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM).
3. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi informasi penyebarluasan informasi kesehatan.

4. Pelaksanaan implementasi system pembiayaan kesehatan melalui jaminan persalinan masyarakat dan mengevaluasi di bidang Binkesmas.
5. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pemimpin sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas Bidang Pelayanan Masyarakat**

Bidang pelayanan kesehatan adalah unsur pelaksanaan dinas dibidangnya yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yaitu Bapak Wahyu Santoso. Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana kesehatan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:

1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana perlatan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya, perencanaan pengadaan, pengelolaan dan pengawasan obat, dan kosmetika.
2. Menyusun kebijakan teknis dari kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan registrasi dan akreditasi peralatan kesehatan swasta, dan pelayanan kesehatan swasta.
3. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi pembinaan teknis pelayanan kesehatan di puskesmas dan

jaringannya, penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan, penyelenggaraan kesehatan khusus, dan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

### **3. Tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga**

Kepala seksi kesehatan keluarga, ibu, anak, dan gizi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut kesehatan keluarga yang dipimpin oleh Ibu Heni Hendrawati.

Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi kesehatan keluarga mempunyai fungsi :

1. Merumuskan rencana program KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga;
2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun;
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga;
4. Pelaksanaan dan penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS);
5. Fasilitasi kesehatan usia lanjut.
6. Peningkatan kesehatan remaja dan generasi muda.
7. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kesehatan, gizi masyarakat, UKS, Usila, keluarga.
8. Penyusunan laporan kegiatan penataan Sistem Informasi Kesehatan pada Seksi Kesehatan Keluarga.

### **4. Kepala Seksi Gizi**

Seksi Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan Gizi Masyarakat yang di pimpin oleh Bapak H. Asep Rohana.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi gizi mempunyai tugas yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja.
2. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis program pembinaan Gizi Masyarakat.
3. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan perbaikan gizi, meliputi penanggulangan gizi buruk, masalah gizi mikro, gizi institusi dan masyarakat, system kewaspadaan pangan dan gizi serta surveilans gizi.
4. Penyiapan bahan advokasi dan koordinasi kegiatan perbaikan gizi, meliputi penanggulangan gizi buruk, masalah gizi mikro, gizi institusi dan masyarakat, system kewaspadaan pangan dan gizi serta surveilans gizi.
5. Penyiapan bahan penyusunan pedoman kegiatan perbaikan gizi, meliputi penanggulangan gizi buruk, masalah gizi mikro, gizi institusi dan masyarakat, system kewaspadaan pangan dan gizi serta surveilans gizi.
6. Penyiapan bahan dan menyusun Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur kegiatan seksi.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi.

## **5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan**

Kepala Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut promosi kesehatan yang di pimpin oleh Bapak Mahmud, SE, M.kes

Kepala seksi promosi mempunyai tugas yaitu :

1. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi.
2. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan promosi kesehatan.
3. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan promosi kesehatan.
4. mempersiapkan bahan dalam pelaksanaan posyandu untuk peningkatan kesehatan.
5. mempersiapkan bahan penyusunan program serta melaksanakan kegiatan TOGA, batra, dan UKK.
6. mempersiapkan bahan dalam pengembangan desa siaga.
7. mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional dan Hari Kesehatan lainnya.
8. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi terhadap sarana dan peralatan kesehatan.

## **6. Kepala Puskesmas Leuwidamar**

Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna diwilayah kerja, Kepala Puskesmas sendiri di pimpin oleh Bapak H.Kumajaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud adalah

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, perbaikan Gizi, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Pencegahan pemberantasan Penyakit, Imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Promosi Kesehatan, JPKM, Usaha Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya kesehatan Jiwa, mata, kesehatan Khusus lainnya, sumber daya kesehatan, system Informasi Kesehatan serta penyusunan dan evaluasi program.
2. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medic, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan swasta dan kader pembangunan kesehatan.
3. Pembangunan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah kerja, pembangunan kesehatan swadaya masyarakat.
4. Memberikan rujukan ke Rumah Sakit umum daerah.